

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer, (1975) dalam yang isinya mengemukakan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai *legitimacy gap*. *Legitimacy gap* akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya (Ang dan Masella, 2015).

Menurut Hadi (2014) dalam menyatakan bahwa *legitimacy gap* (*incongruence*) dapat terjadi karena beberapa faktor seperti :

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah kearah yang berbeda atau kearah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat (Fathoni, *et al*, 2016). Menurut Sari (2013) mengatakan dalam teori legitimasi tersebut perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat.

Teori legitimasi menjelaskan tentang adanya kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. Adanya perbedaan nilai-nilai norma antara perusahaan dan masyarakat sekitar akan menimbulkan *legitimacy gap*. Selain itu perusahaan juga dianjurkan untuk menarik perhatian masyarakat sekitar dan meyakinkan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan baik dan tidak merugikan masyarakat agar dapat diterima dan dianggap *legitimate*. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk meyakinkan masyarakat akan kegiatan operasionalnya yang tidak akan merugikan masyarakat adalah dengan pengungkapan lingkungan yang bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan dan memertahankan legitimasi yang telah diterima dari masyarakat.

2.2 Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Rudianto (2013) menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Terdapat pula pendapat dari Fahmi, (2014) yang mengemukakan bahwa Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Analisis kinerja digunakan untuk mengukur prestasi yang dimiliki perusahaan. Lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu (Fahmi, 2014):

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Tahap pertama yaitu mereview data laporan keuangan. Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi. Tahap ini pada akhirnya akan memberikan hasil laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perhitungan. Tahap kedua yaitu melakukan perhitungan terhadap data pada laporan keuangan. Penerapan metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan, sehingga hasil dari perhitungan akan memberikan kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Tahap selanjutnya yaitu melakukan perbandingan pada hasil yang telah diperoleh. Hasil hitungan yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipakai yaitu:
 - a. *Time series analysis* yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antarperiode dengan tujuan akan terlihat secara grafik.
 - b. *Cross sectional approach* yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
 - c. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
4. Tahap keempat yaitu menginterpretasikan masalah-masalah yang ada. Melihat kinerja keuangan perusahaan setelah melakukan ketiga tahap, kemudian melakukan penafsiran untuk melihat permasalahan dan kendala-kendala yang dialami perbankan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Tahap terakhir setelah menemukan berbagai permasalahan yang ada yaitu mencari solusi. Mencari solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar kendala dan hambatan dapat diselesaikan.

Analisis kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan perusahaan secara kritis, yang meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada periode tertentu. Berdasarkan tekniknyanya, analisis kinerja dapat dibedakan menjadi 9 macam, yaitu (Hery, 2016):

1. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun persentase (relatif).
2. Analisis Tren, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis *Common Size*, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen asset tetap terhadap total asset, persentase masing-masing komponen hutang dan modal terhadap total asset, persentase masing-masing komponen laba rugi terhadap penjualan bersih.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.
8. Analisis Titik Impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
9. Analisis Kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditor, seperti bank.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Dimana rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan

(Sudana, 2015). Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat keuntungan yang diperoleh manajemen dapat mempengaruhi kompensasi yang akan diterima manajemen.

Menurut Kasmir (2014), tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periodetertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modalsendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara sebagai berikut (Sudana, 2015):

1. *Return On Assets* (ROA)

Return On Asstes (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak

manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang samabisa dihasilkan laba yang besar, dan sebaliknya.

Rumus ROA yaitu :

$$\text{ROA} = \frac{\text{EAT (Laba Setelah Pajak)}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Rumus ROE yaitu :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Sendiri}}$$

3. *Profit Margin Ratio*

Profit Margin Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan

semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Profit Margin Ratio dibedakan menjadi.

a. Net Profit Margin

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

Rumus *Net Profit Margin* yaitu :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

b. Operating Profit Margin

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba.

$$\text{OPM} = \frac{\text{Penjualan Netto} - \text{HPP} - \text{Biaya Adm, Penjualan, Umum}}{\text{Penjualan Netto}}$$

c. Gross Profit Margin

Rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi.

Rumus *Gross Profit Margin* yaitu :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Total Aset}}$$

Oleh karena itu kinerja keuangan dapat diukur menggunakan ROA. ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015).

2.3 Tata Kelola Perusahaan (*Good Governance Corporate*)

2.3.1 Definisi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentusaja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Menurut Arief (2016) pengertian *good corporate governance* adalah *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara

profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Menurut Bambang Rianto Rustam (2017) *good corporate governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan.

Good Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan stakeholder, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah”. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Serta mengawasi proses pengendalian usaha, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan masyarakat. Menurut Veno (2015) istilah *Good corporate governance* secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan stakeholders, seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.

2.3.2 Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Menurut Arief (2016) penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Adapun menurut Siswanto Sutojo (2008), *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kewajiban para anggota stakeholders non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan *board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan keyakinan

dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, melindungi hak dan kewajiban para pemegang saham, dan untuk meningkatkan mutu perusahaan.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Prinsip-prinsip dari *Corporate Governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip Transparansi (*transparency*)
2. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)
3. Prinsip Responsibilitas
4. Prinsip Independensi
5. Prinsip Kesetaraan

Berikut penjelasan mengenai prinsip GCG diatas:

a. Prinsip Transparansi (*transparency*)

Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

b. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat memprttanggungjawabkan serta

mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.

c. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematu peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas- 15 batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

d. Prinsip Independensi

Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

2.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Sonya Majid (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut (Pasaribu, *et al*, 2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik / pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan

akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik.

Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan menimbulkan dugaan bahwa nilai perusahaan yang meningkat akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Dalam hal ini akan muncul masalah keagamaan, dimana agen yang ditunjuk principal tidak bekerja sesuai dengan tujuan pemegang saham. Berikut pengukuran kepemilikan manajerial :

$$MNJR = \frac{\text{Jumlah Saham Komisaris, Direksi dan Manajer}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberi kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Menurut Pasaribu, *et al* (2016) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan (I Wayan, *et al* 2016). Sedangkan menurut Mei

Yuniati, *et al* (2016) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Kepemilikan institusional sebagai penyedia dana untuk modal perusahaan mempunyai klasifikasi tertentu dalam menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Untuk meraih kepercayaan institusi, maka perusahaan harus memberikan informasi yang handal dan relevan kepada pihak institusi melalui pelaporan keuangan. Dengan terjaminnya kualitas pelaporan keuangan, hal ini akan berpengaruh pada persentase laba dimasa mendatang. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Berikut pengukuran kepemilikan Institusional :

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.6 Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan.

Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan

kordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada (Bukhori, 2012). Berikut pengukuran dewan direksi :

Dewan Direksi = Jumlah keseluruhan anggota dewan direksi
--

2.7 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi.

Hal ini diharapkan untuk meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham (Sulistiyowati, 2017). Menurut El-Chaarani (2014) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2009).

Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Tugas-tugas utama dewan komisaris menurut OECD (2009) meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (Hasan, 2009).

Berikut pengukuran dewan komisaris :

Dewan Komisaris = Jumlah keseluruhan anggota dewan Komisaris
--

2.8 Komite Audit

Menurut Mirawati Halini (2012) komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Berikut pengukuran komite audit :

Komite Audit = Jumlah keseluruhan anggota komite audit

2.9 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang arus kas operasi, pertumbuhan perusahaan dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan. Hasil dari beberapa penelitian akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian lain, antara lain adalah sebagai berikut ini:

No	Judul, Nama dan Tahun penelitian	Variabel	Hasil
1.	<i>Impact of Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Lag on Corporate Financial Performance</i> Ben Kwame Agyei-Mensah (2018).	Independen : X1 : Dewan Independen X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Ukuran Perusahaan X4: <i>Leverage</i> X5 : Ukuran Dewan X6 : <i>Liquidity</i> X7 : Komite Audit X8 : <i>Block Ownership</i> Dependen : Y1 : Kinerja Keuangan	Hasil menunjukkan bahwa atribut <i>Corporate Governance</i> ada pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Hasil ini juga menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

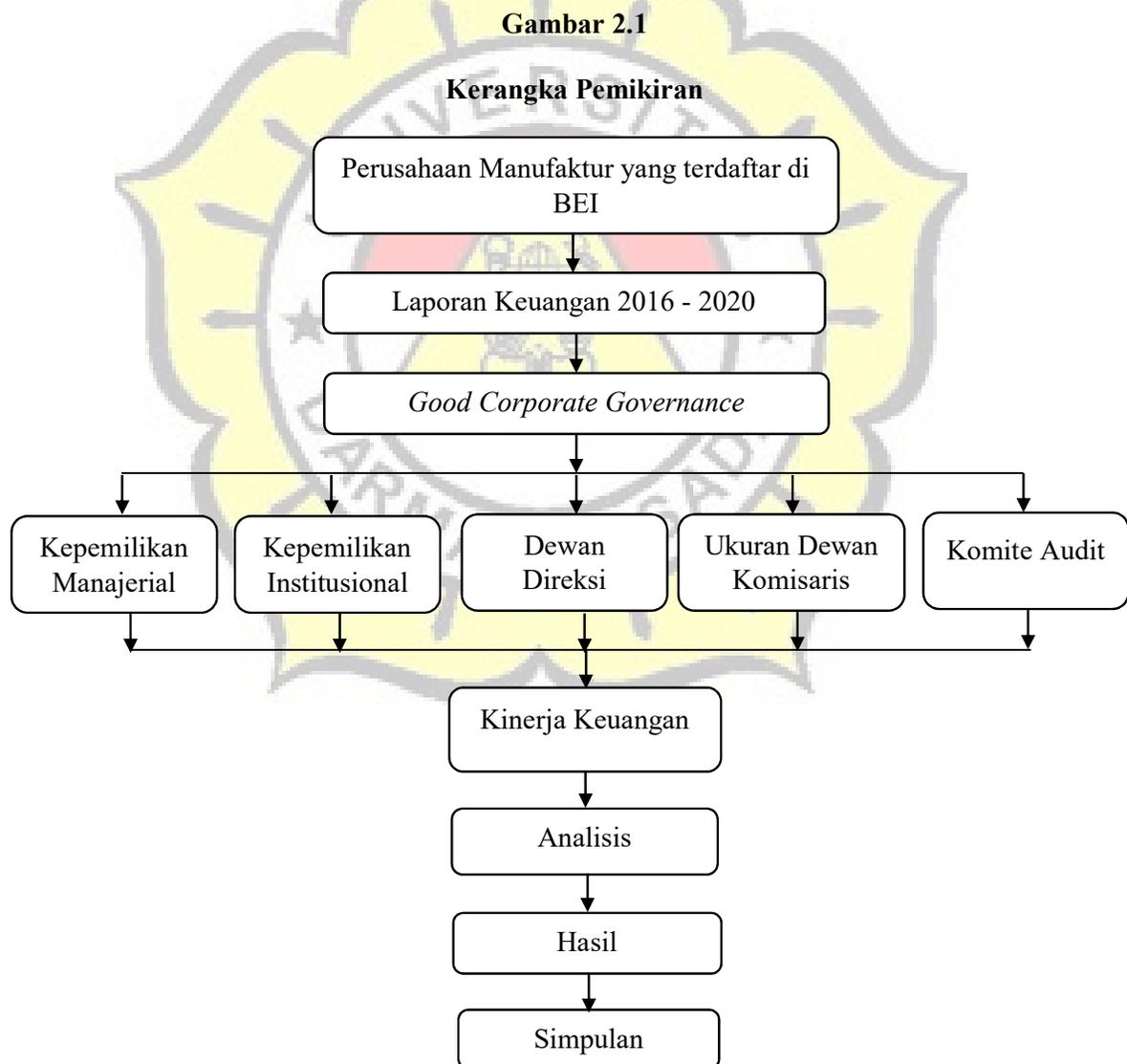
No	Judul, Nama dan Tahun penelitian	Variabel	Hasil
2.	<p><i>The Effect of Good Corporate Governance Mechanism, and Earning Management on Company Financial Performance</i></p> <p>Yayan Nuryana and Dwi Asih Surjandari (2019)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Dewan Direksi X2 : Kepemilikan institusional X3 : Kepemilikan Manjaerial X4 : Komisaris Independen X5 : Komite Audit X6 : Manajemen Penghasilan</p> <p>Dependen :</p> <p>Y1 : Nilai Perusahaan Y2 : Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.</p>
3.	<p><i>Corporate governance Mechanism and Financial Performance : New Evidence from Indonesia Family Firm</i></p> <p>Agus Harjito, Rashidah Abdul Rahman, Said (2020)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Dewan Komisaris X2 : Ukuran Dewan Komisaris Independen X3 : Dewan Direksi X4 : Komite Audit X5 : Kepemilikan Institusional</p> <p>Dependen Y : Kinerja Keuangan</p>	<p>Penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional, dewan direksi dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris sebaliknya berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.</p>
4.	<p><i>Corporate governance and firm performance: an empirical evidence from Syria</i></p> <p>Zukaa Mardnly, Sulaiman Mouselli, Riad Abdulraouf, (2018)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Dewan Direksi X2 : Struktur Kepemilikan X3 : Komite Audit</p> <p>Dependen :</p> <p>Y1 : Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komite audit hanya berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Begitupula dengan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</p>
5.	<p><i>Effect of Capital Structure and Good Corporate Governance</i></p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Debt to Equity Ratio X2 : Dewan Direksi X3 : Dewan Komisaris</p>	<p>Hasil menunjukan dewan direksi, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial berpengaruh negative</p>

No	Judul, Nama dan Tahun penelitian	Variabel	Hasil
	<p><i>on Financial Performancein Manufacturing Companies based on the Indonesia Stock Exchange</i> Mulyana Mahmud, Ahmad H Ibrahim, Abdul Khalik, Moh Zulkifli Murfat, dan Jafar Basalamah (2020)</p>	<p>X4 : Komite Audit X5: Kepemilikan Manajerial X6 : Kepemilikan Institusional Dependen Y: Kinerja Keuangan (ROA) (ROE)</p>	<p>terhadap kinerja keuangan sedangkan komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.</p>
6.	<p><i>Analisis Effect of Corporate Govenance on Financial Performance with Variabel Cotrol Firm size</i> Yanti dan Yulinda (2019)</p>	<p>Independen : X1 : Dewan Komisaris X2 : Proporsi Komisi Luar X3 : Ukuran Dewan X4 : Kepemilikan Institusional X5: Kepemilikan Manajerial X6 : Komite Audit Dependen: Y: Kinerja Keuangan</p>	<p>Penelitian ini menunjukan hasil dimana kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.</p>
7.	<p><i>The Influences of Corporate Governance Mechanism Towards Company's Financial Performance</i> Ready Wicaksono, Dasriyan Saputra dan Dr Hairul Anam (2019)</p>	<p>Independen : X1 : Dewan Komisaris X2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen X3 : Komite Audit X4 : Kepemilikan Manajerial X5 : Kepemilikan Institusional X6 : Tipe Auditor Dependen : Y : Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan sebaliknya kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan</p>

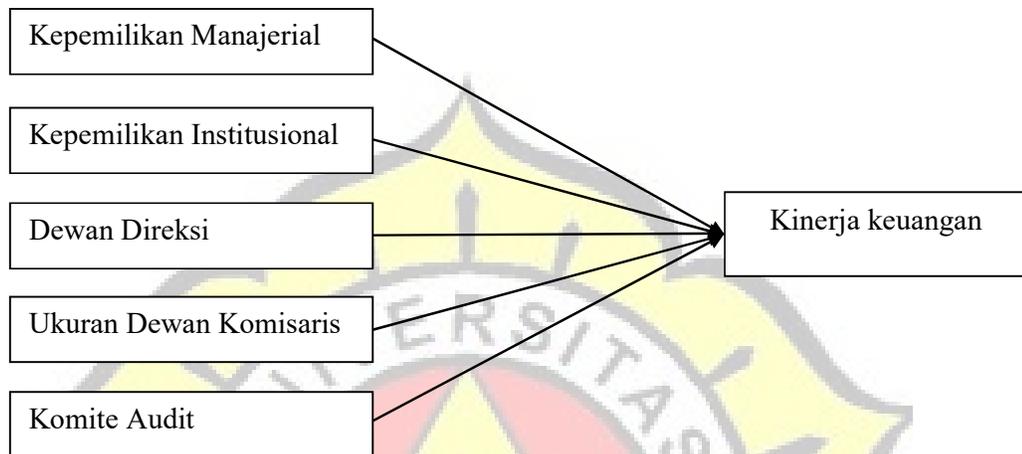
No	Judul, Nama dan Tahun penelitian	Variabel	Hasil
8.	<p><i>The Effetivity of Internal and External Corporate Govenance Mechanism Toward Corporate Performance</i></p> <p>Christiana Dharmastuti dan Sugengn Wahyudi (2015)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Komisaris Independen</p> <p>X2 : Kepemilikan Institusional</p> <p>X3 : Pemegang Hutang</p> <p>Dependen :</p> <p>Y : Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian ini kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.</p>
9.	<p><i>The Influence of Corporate Governance Mechanism on Performance of Manufacturing Listed Companies in INDEX</i></p> <p>Emylia Yuniarti, Syamsurijal AK, Winwin Yadiati dan Lukluk Fuadah (2020)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Kepemilikan Manajerial</p> <p>X2 : Kepemilikan Institusional</p> <p>X3 : Dewan Komisaris Independen</p> <p>X4 ; Komite Audit</p> <p>X5 : Hutang Ekuitas</p> <p>Dependen :</p> <p>Y : Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan</p>
	<p><i>The Influence Mechanism of Corporate Governance on Performance of the Company</i></p> <p>Raja Adri Satriawan Surya, Arumega Zarefar, dan Vera Oktari (2019)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1 : Dewan Komisaris</p> <p>X2 : Kepemilikan Manajerial</p> <p>X3: Kepemilikan Asing</p> <p>X4 : Pembiayaan Hutang</p> <p>X5 : Kualitas Audit</p> <p>Dependen :</p> <p>Y: Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan dewan komisaris dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.</p>

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjuk pada gambar berikut :



Gambar 2.2
Hubungan Variabel



Sumber: data diolah oleh penulis (2021)

Keterangan :

X1 : Kepemilikan Manajerial

X2 : Kepemilikan Institusional

X3 : Dewan Direksi

X4 : Ukuran Dewan Komisaris

X5 : Komite Audit

Y : Kinerja Keuangan

2.11 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah di kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah sebagai berikut:

2.11.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Biaya agensi yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara manajer dan agen dapat dikurangi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di perusahaan. Manajer yang memiliki saham di perusahaan, perusahaan akan makmur, karena secara otomatis kepentingan pribadi juga akan terpenuhi (Purwanto, 2011). Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan meningkat saham yang terdapat diperusahaan. Hasil penelitian Hermiyetti dan Katlanis (2017) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin efisien pemanfaatan aset. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.11.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penelitian yang dilakukan oleh (Candradewi, 2016) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Fadillah (2017) diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.11.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Maka dari itu Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi para stakeholder Selain itu, semakin banyak anggota dewan direksi, akan membuat network dengan pihak luar

perusahaan akan menjadi lebih baik hal tersebut akan membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin membaik. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Rahmawati, *et al*, (2017) yang mengatakan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H3 : Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.11.4 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Jika lebih banyak dewan komisaris maka perusahaan akan lebih diawasi dan dapat meminimalisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Candradewi (2016) yang mengatakan bahwa dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H4 : Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.11.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian Arifani (2013) mengatakan bahwa ukuran komite audit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Karena tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan semakin baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat. Menurut Amelya (2017) Penelitian ini menunjukkan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

H5 : Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.